

- Atmaja, A, Dinar. 2016. "Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa". Penerbit HB. Bahri,
- Ahmadi,K.B. 2014. Acehnologi.Banda Aceh Bandar Publishing.
- Akbar, Lukmanul, Dipo. 2015. "Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".
- Bambang Riyanto. 2013. Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan. Edisi 4. Yogyakarta,BPF
- Harsoyo. 1977. Manajemen Kinerja, Jakarta. Persada.
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa
- R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya Jakarta Ghalia Indonesia, 1989.
- Sukmadinata,N.S. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. BandungPT Remaja Rosdakarya.
- Supriadi, E. 2015."Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Jurnal IUS, Vol. 3, No. 8.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung Alfabeta.
- Suharto Edi. 2008. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta.
- Sutrisno. 2007. Manajemen Keuangan. Jakarta, Erlangga
- Taliziduhu Ndraha. 1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta, Bumi Aksara
- Utomo, S. J. 2015. "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)". Media Trend, Vol. 10, No. 1.

Undang-Undang

- a. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

